

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- _____, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Edisi 1, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006)
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Effendi Perangin, 1987, *Praktek Jual Beli Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Francis Fukuyama, 2007, *TRUST: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Jogjakarta.
- Gusfahmi, 2011, *Pajak Menurut Syariat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, t.t., *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*.
- Miyasto, 1997, *Sistem Perpajakan*, PT. Liberty, Yogyakarta.
- Murtir Jeddawi, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah)*, Total Media, Yogyakarta.

- Nuruddin Ali, 2006, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1984, *Undang-undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Santoso Brotodihardjo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Rochmat Soemitro dan Kania Sugiarti , 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Jakarta.
- _____, 2010, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Ed. Revisi, PT Refika Aditama, Bandung.
- Saktisila Widjono, W, (2013), *Tesis, “Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Medan”*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan edisi 1*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2013 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sohari Sahrani, Ru‘fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Penerbit, Bogor.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah edisi 1 cetakan 1*, Kencana, Jakarta.
- Y. Sri Pudiarmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Yurisriyadi, 2020, *Ilmu Hukum Dogmatik dan Teoretik Serta Problema Penegakan Hukum*, Undip Press Semarang, Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Pekalongan.

C. Lain-Lain

Jurnal/Artikel Ilmiah

Damanhuri Fattah, 2013, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS* Vol.9 No.2.

Dina Erlinda, dkk, 2020, “Pelaksanaan Verifikasi Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Bogor”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 2.

Harnita, dkk, 2019, “Tanggung Jawab PPAT dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No. 3.

Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar, 2017, “Pengaruh BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau”, *Jurnal Akrab Juara 2*, No. 2

Ronal Ravianto dan Amin Purnawan, 2017, “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Pendekatan Self Assessment System. *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.

Saktisila Widjono, W, 2013, “Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Medan”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Suryanto, Bambang Hermanto, dan Mas Rasmini, 2018, “Analisis Potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Pajak Daerah,” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* Vol. 3, No. 3

Yoyon Mulyana Darusman, 2016, Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1.

Yunita Budi Chrissanni dan Amin Purnawan, 2017, *Peranan PPAT Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan (BPHTB) On Line Atas Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Pekalongan*. *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3.

Internet

<https://kbbi.kata.web.id/pembebanan/>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>

<https://www.rumah.com/panduan-properti/ketahui-perbedaan-notaris-dan-ppat-9191>

www.pekalongankab.bps.go.id

Yahya Abdurrahman, *Dharibah (pajak)*, <http://Hayatulislam.net>

